

**FENOMENA KONFLIK PERGULATAN SILAT SETIA HATI TERATAI DAN
SETIA HATI WINONGO DI KOTA MADIUN DAN SEKITARNYA**



**Diskusi Ilmiah Dosen Tetap UIN Sunan Kalijaga
Tahun Ke -32, 2011 Tanggal 17 Februari 2012
Dipersembahkan oleh: Dandung Budi Yuwono dari LEMLIT
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

MODERATOR : Prof. Dr. H.M. Abdul Karim, M.A., M.A.

**Sekretariat
Diskusi Ilmiah Dosen Tetap
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
2012**

FENOMENA KONFLIK PERGURUAN SILAT SETIA HATI TERATAI DAN SETIA HATI WINONGO DI KOTA MADIUN DAN SEKITARNYA

Dandung Budi Yuwono
Peneliti di Lemlit UIN Sunan Kalijaga

Abstrak

Konflik antara dua perguruan silat Setia Hati Teratai (SHT) dan Setia Hati Winongo (SHW) di Kota Madiun dan sekitarnya merupakan fenomena menarik. Tidak saja karena berlangsung berulang dari tahun ke tahun tetapi lebih dari itu, bahwa dalam diskursus publik konflik dua perguruan silat merupakan suatu *constructed reality* yang telah menjauhkan kesadaran publik tentang persoalan yang sesungguhnya terjadi. Pengetahuan publik tentang konflik merupakan pengetahuan yang bias oleh kepentingan-kepentingan dari berbagai pihak yang mengendalikan kekuasaan.

Penelitian kualitatif dengan pendekatan etnopolitik ini ingin menjawab dua pertanyaan, mengapa konflik antara SHT dengan SHW tak kunjung usai dan faktor-faktor apa yang melatarbelakangi konflik antara SHT dan SHW?. Penelitian ini bertujuan: (1) memaparkan potret konflik antara SHT dengan SHW seperti yang dikonstruksikan secara sosial dan bagaimana potret itu di *decode* oleh publik dalam berbagai bentuknya; (2) menganalisis pertikaian sebagai *constructed reality* dengan melihat apa yang mendasari pertikaian itu, baik dalam konteks mikro maupun dalam konteks makro di luar kelompok yang bertikai; dan, (3) menganalisis pengetahuan, sikap dan tindakan pemerintah terhadap konflik tersebut. Dengan demikian penelitian ini tidak hanya bermanfaat untuk melakukan strategi penyelesaian konflik antara SHT dengan SHW, lebih dari itu diharapkan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan model pendekatan terhadap penyelesaian konflik antarkelompok, seperti konflik antarkampung, konflik antarkomunitas, dan sebagainya yang kerap terjadi di Indonesia sekaligus dapat memberi gambaran ruang-ruang sosial yang mampu mempertemukan mereka, dan situasi semacam apa mereka saling memiliki ketergantungan.

I. Pendahuluan

Pertikaian antara dua perguruan pencak silat Setia Hati Teratai (SHT) dan Setia Hati Winongo (SHW) di Kota Madiun dan sekitarnya merupakan pemandangan yang teramat biasa bagi orang Madiun. Ketika salah satu perguruan melakukan aktivitas massal, toko-toko di sepanjang jalan Kota Madiun yang biasa dilewati konvoi serentak tanpa dikomando menutup lebih awal sehingga kota menjadi sepi dari aktivitas ekonomi.¹ Kejadian semacam itu selalu berulang dari tahun ke tahun, dan

¹ Suasana mencekam tampak di berbagai sudut Kota Madiun, Jawa Timur pada Minggu (detik surabaya.com, 4/11/2007). Sedikitnya 1.000 personil kepolisian dengan senjata laras panjang berjaga-jaga di sepanjang jalan utama dan tempat keramaian di Kota Madiun. Pada hari ini, sedikitnya ribuan pendekar dari Perguruan Silat Persaudaraan Setia Hati Winongo melakukan 'halal bihalal' yang dipusatkan di Desa Winongo, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun. Pengalaman sebelumnya, saat terjadi kerumunan pendekar maka aksi kekerasan, kriminalitas dan bentrok pendekar antarperguruan silat Winongo dan Setia Hati Teratai kerap kali terjadi. Tokoh agama, pemerintah, dan pendidik tidak

belum ada penguasa atau pihak yang mampu mengatasi konflik secara menyeluruh sehingga konflik semakin meluas dan masuk ke dalam ruang-ruang yang lebih rumit: ekonomi, politik, birokrasi, sosial, kebudayaan dan termasuk agama. Bahkan beberapa posisi penting di birokrasi berafiliasi berdasar kelompok tersebut, sehingga dalam hal tertentu konflik seringkali terseret pada aras pemerintahan. Demikian halnya dengan elite agama lokal, mereka juga acap kali terjebak dalam pertentangan dua kubu. Dengan cara yang sama, konflik antara dua perguruan silat SHT dan SHW tidak hanya merupakan konflik dua perguruan tetapi lebih dari itu. Dalam diskursus publik, konflik merupakan suatu *constructed reality* yang telah menjauhkan kesadaran publik tentang persoalan yang sesungguhnya terjadi. Dalam arti pengetahuan publik tentang konflik merupakan pengetahuan yang bias oleh kepentingan-kepentingan dari berbagai pihak yang mengendalikan kekuasaan.

Bagi orang Madiun, agama dan beladiri pencak silat menjadi sebuah nafas yang menyatu dalam denyut kehidupan. Akibatnya konflik dua perguruan itu tidak hanya sekadar berada pada ruang atau di wilayah sosial, tetapi juga kebudayaan dan agama. Pertikaian SHT dengan SHW bukan sekadar persoalan perbedaan dua kelompok, tetapi persoalan struktural yang jauh lebih rumit. Hal yang lebih penting, bahwa konflik telah terjadi dalam suatu ruang sosial politik dan ekonomi tertentu yang bagaimanapun kondisi ruang itu telah membentuk karakter konflik itu sendiri. Bisa jadi perubahan corak sistem sosial, politik, dan ekonomi yang dipengaruhi oleh tekanan-tekanan global juga akan mengubah karakter persoalan konflik yang ada pada tingkat daerah. Selain itu, perbedaan aliran yang merupakan fenomena masa lalu tidak hanya mempengaruhi masa kini, tetapi masa lalu juga secara berkesinambungan dikonstruksikan kembali pada masa kini. Perbedaan SHT dan SHW itu bukan hal yang penting pada masa lalu tetapi kemudian dihadirkan kembali pada masa kini dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dalam situasi tertentu (Abdullah, 2001; Sutherland, Raben, dan Locher-Scholten, 2002).

Studi antropologi dalam kaitannya dengan studi etnopolitik bertugas untuk mengungkapkan makna-makna dari tindakan pelaku yang bertikai dengan melihat pada simbol-simbol komunikasi yang digunakan oleh suatu kelompok yang bertikai (Abdullah dan Noer, 2002). Dengan cara ini akan memungkinkan kita mengetahui, apa persoalan yang sesungguhnya yang dihadapi oleh mereka hingga melahirkan pertikaian di antara mereka. Oleh karena itu, penelitian ini dirumuskan ke dalam dua pertanyaan relevan: (1) mengapa konflik antara SHT dengan SHW tak kunjung usai?; dan (2) faktor-faktor apa yang melatarbelakangi konflik antara SHT dan SHW?

pernah berhasil menyelesaikan konflik yang sudah berlangsung lebih dari 30 tahun (detiksurabaya.com., 5/11/2007).

Penelitian ini bertujuan: (1) Memaparkan potret konflik antara SHT dengan SHW seperti yang dikonstruksikan secara sosial dan bagaimana potret itu di *decode* oleh publik dalam berbagai bentuknya; (2) Menganalisis pertikaian sebagai *constructed reality* dengan melihat apa yang mendasari pertikaian itu, baik dalam konteks mikro maupun dalam konteks makro di luar kelompok yang bertikai; dan, (3) Menganalisis pengetahuan, sikap dan tindakan pemerintah terhadap konflik tersebut. Dengan demikian penelitian ini tidak hanya bermanfaat untuk melakukan strategi penyelesaian konflik antara SHT dengan SHW, lebih dari itu diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan model pendekatan terhadap penyelesaian konflik antarkelompok, seperti konflik antarkampung, konflik antarkomunitas, dan sebagainya yang kerap terjadi di Indonesia dan dapat memberi gambaran ruang-ruang sosial yang mampu mempertemukan mereka, dan situasi semacam apa mereka saling memiliki ketergantungan.

Penelitian yang mengungkap atau memberikan gambaran secara tuntas mengapa konflik antara SHT dan SHW tak kunjung usai masih belum dilakukan. Penelitian Probo (2002) melihat konflik antara SHT dan SHW terbatas pada perspektif sejarah, yang mana hanya mengungkap pada persoalan pecahnya dua perguruan silat tersebut. Demikian dengan sebagian terbesar dari penelitian serta kajian tentang konflik di Indonesia, masih memberi kesimpulan tentang resolusi konflik, di samping persoalan bahwa konflik di Indonesia merupakan problem sejarah (Sastrowardoyo et. al., 2000; Mudiyo, et. al., 2000; Sudagung, 2001; Leirissa, 2001; Ida, 2001; Alqadrie, 1999; 2001). Masing-masing penelitian, menyimpulkan; pertama, basis-basis kesadaran kultural yang berlebihan merupakan titik awal konflik di berbagai tempat di Indonesia. Kedua, dalam kasus konflik di Ambon dan Poso, agama merupakan alat yang melandasi terciptanya konflik.

Dampak dari konflik yang cukup panjang dan menyebar di Indonesia, oleh para peneliti lebih banyak difokuskan kepada persoalan-persoalan ekonomi serta stabilitas sosial yang mengalami disfungsi. Secara politis, teori dan model pembangunan ekonomi dan industrialisasi yang diterapkan rezim Orde Baru disinyalir merupakan titik pangkal terjadinya kerusuhan di Ambon (Suparlan et. al., 1999), di samping itu rezim ini telah menutup ruang perbedaan dan mengikis nilai-nilai kebudayaan yang berbeda dengan sangat represif.

Penelitian ini tidak hanya memberikan sebuah resolusi, tetapi lebih dari itu akan memberi makna dari satu strategi pemecahan konflik dengan basis kebudayaan. Ini akan memberi efek penyelesaian yang lebih jangka panjang, meskipun memerlukan beberapa syarat yang nantinya akan ditemukan melalui studi.

Anggota SHT dan SHW yang terdapat di berbagai tempat tidak lagi berada dalam batas-batas fisik (*physical boundaries*) yang tegas karena keberadaan mereka telah bercampur dengan masyarakat lain yang antarmereka telah membagi wilayah secara saling bersinggungan atau bahkan berhimpitan.

Dalam masyarakat semacam itu, kelompok menjadi sesuatu yang ditegaskan dan dipertukarkan dalam serangkaian interaksi. Di satu sisi, ia merupakan potensi yang membentuk identitas dan ciri-ciri pembeda satu dengan yang lain, dari warna kulit, postur tubuh, bahasa, cara berbicara, persepsi hingga ke gaya hidup. Di sisi lain, merupakan faktor di dalam konflik sosial karena identitas dan ciri pembeda tersebut di atas telah digunakan secara sosial tidak hanya sebagai 'ciri pembeda' tetapi sebagai faktor 'pemisah' (eksklusi sosial) antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam suatu sistem sosial dan historis.

Dalam suatu lingkungan sosial konflik dan integrasi dikelola secara bersama-sama dalam interaksi sosial masyarakat. Untuk melihat proses interaksi dalam suatu *setting* sosial tertentu ada tiga hal penting yang dapat diperhatikan. *Pertama*, artikulasi keberadaan suatu kelompok, di mana kehadiran setiap kelompok mengalami proses penegasan baik oleh kelompok yang bersangkutan maupun oleh kelompok lain yang ada di suatu lingkungan sosial. Ekspresi suatu kelompok merupakan keberlanjutan masa lalu yang merupakan bentuk politik emansipatoris dan penegasan autentisitas etnis (Appadurai, 1995). Politik emansipatoris merupakan suatu strategi untuk menghadirkan kesukubangsaaannya dalam suatu *setting* sosial yang cenderung menghilangkan batas-batas kelompok (Abdullah, 1999; Soros, 2000). Proses penegasan tersebut dapat pula dilakukan oleh lingkungannya atau oleh kelompok lain untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Dalam serangkaian proses sosial semacam ini, kelompok bukan lagi merupakan sesuatu yang dibawa secara biologis, tetapi merupakan suatu konstruksi sosial yang keberadaannya berlangsung karena pemaknaan dalam serangkaian interaksi yang terjadi antara kelompok satu dengan kelompok lain.

Kedua, keberadaan ruang publik di mana perbedaan antarkelompok mendapatkan pengikisan dalam proses pembauran di suatu ruang publik. Dalam suatu ruang publik tertentu masyarakat belajar berkomunikasi dengan cara lebih cepat dapat diterima secara umum di satu sisi dan di lain sisi belajar untuk menerima perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh kelompok lain (Green, 1995). Ruang-ruang publik yang terbentuk pada dasarnya memiliki potensi pengikat yang sangat kuat di dalam pembentukan solidaritas baru yang lintas etnis dan lintas budaya (Starr, 1999; Kappus, 1999). Dalam interaksi semacam ini juga selain akan menghilangkan perbedaan-perbedaan atau terjadinya penerimaan terhadap ciri-ciri yang berbeda, juga akan menghasilkan pengayaan-pengayaan dalam berbagai bentuknya. Ciri-ciri yang berbeda dapat saja kemudian tidak dinilai sebagai faktor pembeda yang memisahkan satu kelompok dengan kelompok lain tetapi dianggap sebagai variasi yang memperkaya lingkungan sosial mereka. Pengayaan-pengayaan akan terjadi pada saat penyerapan bentuk-bentuk ekspresi satu kelompok diadopsi oleh kelompok lain yang seringkali dipakai dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari ekspresi seseorang atau sekelompok orang (Eller, 1999).

Proses semacam ini memiliki potensi di dalam pembauran dalam lingkungan sosial tertentu. Ruang-ruang publik yang tersedia dalam berbagai bentuk memungkinkan komunikasi budaya berlangsung dengan baik.

Ketiga, simbol-simbol komunikasi antarkelompok merupakan kunci dalam proses pembauran. Manusia sebagai makhluk simbolis cenderung hidup dalam proses menciptakan simbol dan membaca atau memaknai simbol-simbol dalam proses interaksi. Simbol tentu saja mengalami suatu proses konstruksi yang berlangsung secara dinamis (Berger dan Luckmann, 1979; Cheater, 1999). Walaupun berbagai simbol telah tersedia dalam kehidupannya, proses pemaknaan dari simbol tersebut dapat berkembang sedemikian rupa sehingga suatu simbol dapat dikonsepsikan secara berbeda berdasarkan pada generasi berbeda.

Makna-makna simbolis ini akan diberikan berdasarkan interpretasi sehingga sangat mungkin bahwa interpretasi tersebut berbeda antara satu generasi dengan generasi lain. Demikian pula halnya dengan kelompok yang berbeda. Di satu sisi, simbol-simbol yang dimiliki oleh satu kelompok belum tentu dapat dimaknai oleh kelompok yang lain atau pemaknaan yang dilakukan menyimpang dari makna yang dikonstruksikan oleh pemiliknya (Green, 1995; Stanfield II, 1994; Geertz, 2000). Di sisi lain satu simbol memang secara prinsipil memiliki makna acuan yang berbeda sehingga konflik sosial mungkin saja terjadi pada saat satu simbol dipakai karena kemudian disalahtafsirkan oleh kelompok yang lain. Penafsiran suatu simbol dilakukan oleh setiap orang berdasarkan kebudayaan yang dimiliki sehingga pemahaman tentang kebudayaan masing-masing kelompok sangat perlu dilakukan (Ahimsa-Putra, 1999). Dalam konteks semacam ini sangat perlu diperhatikan bagaimana suatu simbol dapat dimiliki bersama sehingga menghasilkan suatu pemahaman yang sama pada saat suatu simbol digunakan dalam proses komunikasi. Simbol-simbol ini pun mengalami pelestarian pada saat ia dianggap fungsional dalam memenuhi kepentingan-kepentingan bersama.

Ketiga aspek di atas merupakan wilayah cakupan yang dianggap penting dalam menjelaskan proses pembauran yang terjadi dalam suatu lingkungan sosial tertentu. Untuk ini, ciri-ciri lingkungan di mana sejumlah kelompok berada merupakan konteks yang sangat menentukan pola komunikasi yang berlangsung. Konteks sosial dalam hal ini memberi kerangka dan membentuk karakter kelompok dan hubungan antarkelompok. Dalam kasus kebudayaan dominan, lingkungan sosial memberi pengaruh yang besar di dalam membangun suatu komunikasi budaya dalam proses interaksi. Sejalan dengan ini, setiap lingkungan sosial memiliki latar belakang historis yang penting untuk dikaji dan memiliki realitas obyektif (Berger dan Luckmann, 1979) yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki daya paksa terhadap setiap anggota dalam proses integrasi sosial.

II. Metode Penelitian

Lokasi penelitian meliputi Kota Madiun dan sekitarnya, atau yang berada di wilayah karisidenan Madiun, terutama di wilayah-wilayah yang menjadi basis konflik. Penelitian ini menggunakan pendekatan ethnopolitik yang melihat konflik dengan cara mengungkapkan makna-makna dari tindakan pelaku yang bertikai dengan melihat pada simbol-simbol komunikasi yang digunakan oleh suatu kelompok yang bertikai.

Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan sendirinya dalam penggalan data di samping menggunakan observasi partisipasi, juga dilakukan wawancara mendalam pada beberapa kelompok, di antaranya: tokoh-tokoh SHT dan SHW, tokoh yang langsung terlibat konflik (pelaku), pimpinan adat, tokoh agama, dan jurnalis lokal. Sementara analisis data dalam penelitian ini sepenuhnya menggunakan analisis deskriptif (interpretif) dengan melibatkan tahap-tahap teknik triangulasi. Sesuai dengan kaidah analisis triangulasi, data yang diperoleh dari informan dianalisis secara terus menerus selama proses pengumpulan data di lapangan berlangsung (Yuswandi dalam Bungin, ed., 2003: 100). Adapun tahapan analisisnya adalah data dan informasi yang diperoleh dikelompokkan menurut kriteria-kriteria yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang mengacu pada konsep atau teori yang dipergunakan (Faisal dalam Bungin, ed., 2003: 64).

Data dan informasi tersebut diklasifikasikan dan dipilah-pilah ke dalam satuan-satuan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Geertz (1992: 33) menyebut tahapan ini dengan istilah diagnosis terhadap tindakan-tindakan simbolis. Setelah diklasifikasi, data yang telah terspesifikasi tersebut selanjutnya diabstraksi, diinterpretasi serta dihubungkan antara yang satu dengan lainnya, sehingga melahirkan dugaan baru mengenai kenyataan-kenyataan yang ditelusuri. Hasil dugaan tersebut kemudian diperbandingkan dengan fakta yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumen.

Setelah diperbandingkan dilakukan pencarian relasi logis untuk menemukan konteks yang terbangun dari fakta yang diperbandingkan tersebut. Dengan meminjam istilah Geertz (1992), konteks yang terbangun tersebut merupakan aliran perbincangan sosial yang diperoleh dari hasil menerka-nerka makna, dan menaksir ulang terkaan tersebut untuk menemukan kesimpulan eksplanatoris dari terkaan yang lebih baik. Pada tahap inilah analisis interpretif dapat diakhiri dan penyajian tulisan etnografi dapat dimulai.

III. Arkeologi Konflik Perguruan Silat Setia Hati Teratai dan Setia Hati Winongo

A. Sejarah Kemunculan Pencak Silat di Kota Madiun

Di Kota Madiun, pencak silat tumbuh dan berkembang seiring dengan sejarah masa lalu yang cukup panjang. Pada masa lalu, para ahli bela diri dan pendekar mempunyai kedudukan yang cukup penting dalam pranata sosial dan mendapat tempat yang tinggi di masyarakat. Begitu pula para *mpu*

yang membuat senjata pribadi yang ampuh, seperti keris, tombak dan senjata khusus. Pasukan yang kuat di zaman Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Mataram serta kerajaan lainnya di masa itu terdiri dari prajurit-prajurit yang mempunyai ketrampilan beladiri individual yang tinggi. Pemupukan jiwa keprajuritan dan kesatriaan selalu diberikan untuk mencapai keunggulan dalam ilmu pembelaan diri. Untuk menjadi prajurit atau pendekar diperlukan syarat-syarat dan latihan yang mendalam di bawah bimbingan seorang guru. Di bagian lain, dalam masa perkembangan agama Islam, ilmu beladiri dipupuk bersama ajaran kerohanian sehingga basis-basis agama Islam terkenal dengan ketinggian ilmu bela dirinya. Jelaslah, bahwa sejak zaman sebelum penjajahan Belanda kita telah mempunyai sistem pembelaan diri yang sesuai dengan sifat dan pembawaan bangsa Indonesia.

Pada tahun 1884, Eyang Kihajar Harjo Utomo belajar ilmu agama Islam di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Dari proses pembelajaran agama Islam inilah Suryo Diwiryo turut mewarnai ajaran pencak silat Setia Hati yang didirikannya pada tahun 1922. Dapat dikatakan bahwa ajaran pencak silat yang diajarkan merupakan ketrampilan pembelaan diri secara fisik dari serangan lawan, sementara ajaran kerohaniannya adalah untuk mempertebal kepercayaan pada diri sendiri sebagai makhluk Tuhan dan lebih mengenal akan pribadi masing-masing.

Perkembangan pencak silat di Madiun selanjutnya banyak dipengaruhi oleh politik Jepang terhadap bangsa yang diduduki, yang berlainan dengan politik Belanda. Terhadap Pencak Silat sebagai ilmu nasional didorong dan dikembangkan untuk kepentingan Jepang sendiri dengan mengobarkan semangat pertahanan menghadapi sekutu. Atas anjuran Shimitsu diadakan pemusatan aliran Pencak Silat di beberapa tempat selanjutnya ditetapkan di seluruh Jawa serentak didirikan gerakan Pencak Silat yang diatur oleh pemerintah. Para pembina Pencak Silat pada waktu itu telah mengusulkan pencak silat menjadi suatu olah raga untuk dipakai sebagai gerakan olahraga pada setiap pagi di sekolah-sekolah. Tetapi usul itu ditolak oleh Shimitsu karena khawatir akan mendesak Taysho, Jepang. Sekalipun Jepang memberikan kesempatan untuk menghidupkan unsur-unsur warisan kebesaran bangsa, tujuannya adalah untuk mempergunakan semangat yang diduga akan berkobar lagi demi kepentingan Jepang sendiri bukan untuk kepentingan nasional. Namun kita akui, ada juga keuntungan yang kita peroleh dari zaman itu. Kita mulai menyadari akan keharusan mengembalikan ilmu Pencak Silat sesuai dengan posisi sosial budaya dalam masyarakat (Probo, 2002).

Pada tahun 1964 Perguruan Setia Hati yang menjadi pelopor perkembangan pencak silat di Kabupaten Madiun telah mengalami perpecahan menjadi Perguruan Setia Hati Winongo (SHW) yang dipimpin oleh R. Jimat Hendro Suwarno dan Perguruan Setia Hati Teratai (SHT) di bawah pimpinan Harjo Utomo. Perpecahan tersebut didorong oleh perbedaan paham tentang kemurnian ajaran masing-masing. Jika ditilik dari asal muasal sejarah, kedua perguruan silat ini adalah berasal dari satu

perguruan yang sama, yakni Setia Hati yang didirikan oleh Ki Soero. Dalam perkembangannya, menurut salah satu versi, SHT yang banyak berkembang di daerah pedesaan 'berbeda arah' dengan SHW yang berbasis di Madiun kota. Pecahnya adalah pada masa kekacauan pemberontakan PKI. Para pendekar SHW dianggap banyak yang menjadi anggota ormas milik PKI, meskipun secara organisasional mereka tidak berafiliasi dengan PKI. Melihat banyaknya anggota SHW yang terlibat dalam PKI, maka SHT menganggap bahwa SHW sudah ke luar dari jalur perguruan yang bernafaskan Islam. Akhirnya pada saat penumpasan PKI, banyak pendekar SHT yang menjadi 'algojo' eksekusi gembong PKI. Tetapi kenyataan ini banyak ditolak, karena menurut SHW, hal itu hanyalah cara SHT untuk memfitnah.

B. Transformasi Basis Konflik dari Identitas ke Ekonomi: Perspektif Budaya

Kasus pertikaian antarperguruan silat persaudaraan SHT dan SHW atau sering disebut STK (Sedulur Tunggal Kecur) di Karesidenan Madiun sangat marak dan melibatkan masa pendukung secara massif. Perkelahian secara turun-temurun antara SHT dan SHW tersebut juga tidak bisa dilepaskan dari *setting* sejarah yang melatarbelakangi. Hadirnya konflik senantiasa menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan berbagai lapisan masyarakat karena disertai dengan pengrusakan serta jatuhnya korban jiwa.

Kedua perguruan tersebut awalnya merupakan satu perguruan, yaitu Setia Hati (diawali berdirinya Sedulur Tunggal Kecur) yang berdiri di Kampung Tambak Gringsing Surabaya oleh Ki Ngabei Soero Diviryo dari Madiun pada tahun 1903. Pada tahun tersebut Ki Ngabei belum menamakan perguruanannya dengan nama Setia Hati, namun bernama "Joyo Gendilo Cipto Mulyo" hanya dengan 8 orang siswa, didahului oleh 2 orang saudara yaitu Noto/Gunadi (adik kandung Ki Ngabei sendiri) dan kenevel Belanda. Organisasi silat tersebut mendapat hati di kalangan masyarakat sekitar tahun 1917, di mana Joyo Gendilo Cipto Mulyo melakukan demonstrasi silat secara terbuka di alun-alun Madiun. Hal ini menjadikan perguruan ini populer di kalangan masyarakat karena gerakan yang unik penuh seni dan bertenaga.

Pada tahun 1917, Joyo Gendilo Cipto Mulyo berganti nama dengan Setia Hati. Sebagai respons untuk mengembangkan pencak silat dengan ideologi ke-SH-an, maka pada tahun 1922 murid Ki Ngabei Soero Diviryo mendirikan Setia Hati Teratai. Pendiri perguruan tersebut meninggal pada tanggal 10 November 1944 dalam usia 75 tahun, dan dimakamkan di Desa Winongo Madiun, yang kemudian oleh berbagai kalangan makam Ki Ngabei dijadikan pusat dari perguruan Setia Hati.

Sepeninggal Ki Ngabei Soero Diviryo, konflik pertentangan ideologi yang dimotori oleh dua muridnya mulai memuncak yang berdampak pada pecahnya SH terbagi dalam 2 wilayah teritorial: SHW yang tetap berpusat di Desa Winongo dan SHT di Desa Pilangbangau Madiun. Basis

antarkedua perguruan pun terbedakan atas kelas-kelas: SH Winongo berkembang di wilayah perkotaan (urban) dengan basis pendukungnya adalah para bangsawan atau priyayi; sedangkan SH Teratai berkembang di wilayah pedesaan dan pinggiran kota (rural dan suburban). Selain itu, perpecahan kedua perguruan juga akibat adanya strategi pengembangan ideologi: yang satu bersifat eksklusif (SHW) sementara Harjo Utomo (SHT) ingin membangun SH yang lebih bisa diterima masyarakat bawah guna melestarikan perguruan. Itu sebabnya, konflik antarkedua perguruan ini lebih mencerminkan sebuah konflik identitas: masing-masing perguruan mempunyai 'klaim kebenaran' bahwa dirinya paling baik dan benar sebagai pembawa nilai ideologi SH yang orisinal sehingga membentuk praktik-praktik diskursif, saling meyalahkan satu sama lain. Konflik atas perbedaan penafsiran dan klaim kebenaran tentang ideologi ke-SH-an terus direproduksi ke hampir seluruh karisidenan Madiun yang akhirnya merambat pada level akar rumput hingga kini yang dipenuhi rasa kebencian satu sama lain.

Tidak mengherankan jika konflik yang digerakkan oleh klaim kebenaran sebagai pemegang otoritas tunggal ideologi ke-SH-an, menjadikan anggota kelompok silat 'mewabah' pada masyarakat di wilayah Karisidenan Madiun, seperti Ponorogo pada umumnya dan masyarakat di Kecamatan Sampung atau pun Badegan pada khususnya yang *notabene* berbudaya agraris. Perkembangan ini cukup beralasan karena sebagai representasi tipologi masyarakat agraris, yang mana dalam kehidupan mereka jarang ditemukan kesibukan lain selain mereka bertani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga ketika kelompok silat masuk dalam kehidupan mereka maka dianggap sebagai suatu kesibukan baru di luar rutinitas. Selain memang, tumbuhsuburnya perguruan silat di Karesidenan Madiun juga di topang oleh ideologi pencak silat yang dikemas dalam atmosfer berfalsafah kebatinan 'kejawen' yang relatif familiar di kalangan masyarakat.² Dengan kata lain hadirnya kelompok silat pada masyarakat Madiun adalah merupakan sebuah media sosial untuk melepaskan rutinitas sehari-hari, dan sebagai pelepas tekanan kemiskinan yang di derita masyarakat.

Implikasinya, dalam perkembangannya menjadi anggota kelompok silat merupakan bagian ruang kultural kehidupan masyarakat. Dengan cara yang sama, masyarakat ikut melestarikan konflik karena tingginya partisipasi mereka di dalam kelompok silat. Di bagian lain, karena tingginya partisipasi masyarakat dalam kelompok silat serta dibarengi sentimen ideologis yang kuat bahkan cenderung emosional dalam bertindak seringkali di manfaatkan oleh kelompok yang memiliki

² Ini sebagaimana ditegaskan oleh Koordinator SH Teratai Cabang Ponorogo di Sampung: "Setia Hati (SH) didirikan oleh kaum bangsawan, karena tidak bisa masuk ke dalam masyarakat bawah karena status sosialnya berbeda, maka salah satu anggota SH mendirikan organisasi Teratai pada tahun 1922 untuk bisa diterima oleh masyarakat bawah sebagai wujud melestarikan perguruan SH supaya tidak hilang, dan bisa diterima pada masyarakat Jawa karena falsafahnya kejawen" (Wawancara, 12/09/2009).

kepentingan, antara lain oleh para politisi lokal agar mendukung partai politik yang di pimpinnya. Kelompok silat dengan ribuan jumlah anggota sangat potensial dalam mendukung kepentingan partai politik tertentu.³

Setiap pertentangan yang terjadi antarkelompok senantiasa berakar dari perbedaan antarindividu, perbedaan pendirian dan perasaan yang dapat melahirkan bentrok di antara mereka (Soekanto, 1998). Adanya perbedaan kepribadian antarkedua warga perguruan silat SHT dan SHW sesungguhnya telah ada semenjak sejarah perpecahan perguruan, yaitu berupa persepsi kemurnian ajaran yang diyakini masing-masing. Hal ini mencerminkan perbedaan kepribadian antara keduanya sedikit banyak disadari atau tidak dipengaruhi oleh tindakan, pola-pola pemikiran dan pendirian dari kelompoknya.

Secara obyektif, konflik yang hadir antarkedua perguruan silat ini sesungguhnya hanya kerap terjadi pada tataran akar rumput, antaranggota kelompok. Karena persoalan klaim identitas atas kebenaran ajaran SH terpatril pada setiap anggota, maka tidak heran jika persoalan-persoalan yang bersifat 'sepele' mampu memicu terjadinya konflik. Artinya, perebutan klaim kepemilikan identitas Setia Hati inilah yang terus memunculkan sentimen-sentimen antaranggota kedua perguruan tersebut merupakan penyebab terjadinya perkelahian hingga kini, di mana pun mereka berada. Salah satu hal yang berlaku umum di wilayah Ponorogo adalah pada saat pertunjukan kesenian Campursari.⁴ Biasanya, perkelahian antaranggota kelompok silat pada pertunjukan Campursari diawali dari datangnya para anggota kelompok silat secara beramai-ramai. Kebanyakan dari mereka datang dalam keadaan 'mabuk'. Selama pertunjukan, mereka 'pelotot-pelototan' dengan anggota kelompok silat yang lain. Jika emosi tak terbenyung, maka salah satu dari mereka akan ke luar dari arena pertunjukan. Hal ini dimaknai sebagai undangan atau tantangan perkelahian. Ketika kelompok silat yang lain mengikutinya, maka terjadilah perkelahian itu di tempat lain, di luar arena pertunjukan campursari.

Sebagaimana diungkap salah satu anggota SHT, "*Anak kulon pasar* (sebelah barat pasar) *drop-dropan* (datang beramai-ramai) dari Ponorogo, mabuk dan bikin masalah dengan anak Teratai dari Medang (nama salah satu dusun di desa Sampung) yang juga sama-sama nonton acara tersebut, plilik-plilikan (saling

³ Fenomena tersebut bisa di lihat sebagaimana yang terjadi pada mantan Bupati Ponorogo Markum, pada tahun 1998 lalu bergabung menjadi anggota kehormatan SH Teratai (Wawancara dengan Koordinator SH Teratai Cabang Ponorogo di Sampung, 12/09/2009).

⁴ Campursari adalah bentuk kesenian yang belakangan ini marak dan berkembang di wilayah Madiun dan Ponorogo, sangat digandrungi masyarakat. Tak heran jika setiap memperingati Hari Kemerdekaan RI di seantero wilayah Karisidenan Madiun tidak luput dari sajian hiburan kesenian ini. Momen ini pula kerap menjadi ajang pemicu konflik antaranggota kelompok silat (Wawancara dengan pelatih SH Teratai Sampung, 12/09/2009).

melihat), *karena sama-sama mabuk mereka berkelahi.*"⁵ Pernyataan lain sebagaimana diungkap oleh salah satu tokoh agama di Desa Sampung: *"Mereka itu selalu saja tidak pernah bisa akur (rukun)".*⁶ Hal senada juga dikatakan oleh salah seorang pelatih SHT, Deni, bahwa: *"SH kuwi bibit kawite mung siji, salah siji muride nyempal dbewe merga rumangsa ora disayang karo gurune, akhire ngedhekne perguruan dbewe, jenenge Winongo kuwi"* (SH asal mulanya satu perguruan, salah satu muridnya keluar karena merasa tidak diperhatikan oleh gurunya, akhirnya mendirikan perguruan sendiri namanya Winongo). Selanjutnya Deni menambahkan, *"Cah Teratai yen pengin gabung karo perguron liya ra apa-apa, pokoke dudu Winongo, soale jane kuwi dasar juruse padha nanging Winongo rada kaku gerakanne..."* (Anak Teratai kalau ingin bergabung dengan perguruan lain boleh saja, asal bukan Winongo, karena sebenarnya jurus dasarnya sama tapi Winongo sedikit kaku gerakannya).⁷

Dari apa yang disampaikan beberapa informan, terlihat bahwa pembentukan kedua kelompok silat tersebut realitasnya berangkat dari sebuah situasi konflik, baik secara ideologi maupun relasi antaranggota dalam perguruan SH. Ki Hajar Hardjo Utomo, pendiri Teratai, mendirikan Teratai karena merasa kurang sepaham dengan ideologi SH yang berbasis pada komunitas bangsawan. Hardjo Utomo ingin membangun SH yang lebih bisa diterima masyarakat bawah guna melestarikan perguruan SH.⁸ Sedangkan Winongo didirikan sebagai manifestasi perasaan salah satu anggota yang merasa 'dianaktirikan' oleh guru mereka dalam perguruan SH. Dengan sendirinya, berangkat dari beberapa informasi tentang konflik identitas asli SH, mampu membantu kita dalam memahami sekaligus menegaskan bahwa sesungguhnya pada dasarnya terdapat konsep *enemy* yang dibangun oleh kedua belah pihak.

Selain isu identitas berkait originalitas, faktor-faktor yang memperparah konflik antara Teratai dan Winongo adalah karena adanya perebutan wilayah dan anggota. Bahwa ketika dua murid SH mendirikan perguruan, masing-masing Teratai dan Winongo, mereka membuat kesepakatan untuk melakukan pembagian wilayah 'kekuasaan'. Winongo akan membangun basis di wilayah perkotaan,

⁵ Wawancara, 12/09/2009.

⁶ Wawancara, 15/09/2009.

⁷ Wawancara, 15/09/2009.

⁸ Pada realisasinya, Teratai memilih bentuk organisasi, bukan perguruan. Konon, ini berkait dengan janji para murid SH untuk tidak membuat perguruan baru, atas permintaan sang guru. Oleh karena itu, para anggota Teratai menyebut kelompoknya sebagai organisasi. Secara teknis organisasional, Teratai dikelola berdasar aturan standar organisasi modern pada umumnya; memiliki kepengurusan, struktur kepemimpinan yang bertingkat dari pusat (di Madiun), cabang (tingkat kabupaten), dan ranting [tingkat kecamatan], serta sistem rekrutmen yang sistematis. Secara ideologis, anggota Teratai tetap mengakui SH sebagai perguruan mereka. Seperti yang diungkapkan oleh Sutrisno, Koordinator Cabang Teratai Ponorogo, "Teratai sebuah organisasi, perguruanannya Setia Hati, dan pencak silat adalah bela dirinya...." (Wawancara, 14/09/2009).

sedangkan Teratai di wilayah pinggiran. Namun pada perkembangannya, ada beberapa wilayah baik perkotaan maupun pinggiran yang menjadi wilayah 'iris' antara Teratai dan Winongo, dan biasanya wilayah ini paling rentan terjadi konflik. Masing-masing organisasi, baik Teratai maupun Winongo bersaing untuk mendapatkan anggota sebanyak-banyaknya. Penggalangan anggota ini tentu saja berorientasi pada prestise organisasi: semakin banyak anggotanya maka ia akan semakin terstigmatisasi sebagai organisasi yang besar.

Sementara cara-cara yang dipakai untuk menggalang anggota biasanya dengan mengajak saudara (adik/kakak), tetangga atau teman sepermainan, dan motif bergabungnya seseorang dalam kelompok silat bisa karena ingin gaul (agar diterima oleh lingkungan), atau sebagai strategi untuk melindungi diri dari gangguan orang, sebagaimana disampaikan oleh informan: "*Kulo tumut perguruan silat diujuk karo mas. Mas Deni sadurunge wis tau melu nang Ambon, sing nglatih yo Mas Deni.*" (Saya mengikuti perguruan silat karena diajak oleh *mas* (kakak kandungnya), Mas Deni sebelumnya sudah menjadi anggota Teratai semenjak di Ambon, yang melatih juga Mas Deni).⁹ Lebih lanjut ia mengatakan: "Saya pernah mendengar orang-orang di *buk* (dam) depan rumah situ ngomong, *melu Teratai wae yen ono opo-opo ben ono sing ngewangi* (ikut Teratai aja biar kalau ada apa-apa ada yang membantu)."

Lebih dari itu, hadirnya nuansa politisasi dalam sebuah organisasi silat ikut ambilperan dalam menambah rantai konflik yang semakin panjang dan sulit untuk diselesaikan. Pertarungan eksistensi antara SHW dan SHT juga berimbas pada perekrutan anggota sebanyak-banyaknya, sekaligus merupakan perebutan basis ekonomi. Artinya, selain persoalan prestise, ternyata pengurus organisasi juga membangun orientasi ekonomi dalam proses rekrutmen anggota. Semakin banyak anggota yang direkrut, maka akan semakin banyak pendapatan yang diperoleh organisasi. Setiap anggota baru yang masuk dikenakan biaya yang tidak sedikit. Seorang anggota Teratai di Sampung Kidul, misalnya, dia harus membayar 700 ribu rupiah untuk biaya latihan setahun yang bisa dicicil dua kali. Sedangkan Winongo mematok harga 100 ribu dengan jadwal latihan yang tidak tetap.

Saat ini di Ponorogo saja SHT memiliki jumlah 'warga' (istilah SHT untuk menyebut anggota organisasinya) sebanyak 35.500 warga suatu jumlah yang sangat potensial untuk dijadikan komoditas berbagai kepentingan tertentu. Dari tarikan biaya anggota kita bisa menghitung berapa pendapatan yang akan diperoleh setiap organisasi silat. Untuk satu kali pelantikan setiap bulan *Sura* (bulan pertama dalam kalender Jawa), Teratai melakukan pelantikan sejumlah 1000-2000 anggota baru. Jika satu anggota membayar 700 ribu rupiah, maka uang yang akan masuk ke organisasi dalam satu tahun

⁹ Wawancara dengan salah seorang anggota Teratai di Sampung, warga Sampung Lor, 12/09/2009.

adalah 700 juta hingga 1,4 milyar rupiah. Jumlah yang fantastis. Tentu, ini merupakan fenomena menarik sebuah organisasi silat dan sekaligus merupakan kekuatan yang sangat besar untuk sekelompok kabupaten 'kecil' seperti Ponorogo.

SHT menjadi kekuatan organisasi massa tersendiri di Kabupaten Ponorogo dengan basis massa mayoritas di daerah pinggiran baik pinggiran kota, kabupaten maupun pinggiran kota kecamatan. Maka tak heran, jika pada tahun 1988 Bupati Ponorogo bergabung menjadi anggota kehormatan SHT, tahun di mana ia untuk kedua kalinya mencalonkan diri menjadi bupati dalam masa kedua periode kepemimpinannya. Tahun ini menjadi sejarah, karena berbagai kasus perkelahian antarperguruan silat SHT dan SHW yang diiringi kasus 'bacok lari' di Ponorogo mulai marak selama hampir 4 tahun. Kecenderungan delegitimasi yang dilakukan bupati tersebut saat itu menjadi suatu kecenderungan yang bersifat umum di kalangan elite formal maupun informal yang ada di tingkat lokal dalam mencari dukungan untuk mencapai tujuannya disebabkan warga dari SH Teratai menjadi mayoritas di Ponorogo.

"Warga Teratai banyak tersebar di daerah pedesaan dan pinggiran kota, karena di antara mereka rasa kekeluargaannya masih erat sehingga sesuai dengan visi organisasi yaitu persaudaraan. Berbeda dengan di kota orang kan banyak kepentingan sehingga persaudaraannya kurang begitu kuat." ¹⁰

Hal serupa juga diungkap oleh informan dari kalangan politisi, *"Basis massa yang potensial itu ya SHT itu massanya hampir di seluruh wilayah Ponorogo malah bisa dikatakan sebagai single majority di Ponorogo sini.... makanya sejak 2 tahun terakhir ini saya menjadi warga Teratai untuk mencari dukungan buat partai saya."* ¹¹

Kecenderungan ini cukup wajar karena SHT memiliki struktur organisasi yang jelas dan cenderung bersifat paternalistik, meskipun dalam ideologi Setia Hati tidak dikenal istilah 'bapakisme', 'sentralisme' atau pun 'kyaiisme'. Namun kenyataannya elite organisasi SHT sangat dihormati oleh *grass root*, sehingga yang terjadi di lapangan adalah berjalannya rantai komando seperti halnya dalam komando militer. Itu sebabnya, banyak pihak yang mengatakan bahwa Warga Teratai yang diandalkan itu hanya jiwa 'preman' saja, sementara mereka itu mudah dikendalikan tinggal tergantung pemimpinnya. ¹²

¹⁰ Wawancara dengan Koordinator SHT Cabang Ponorogo, 12/9/2009.

¹¹ Wawancara dengan tokoh Golkar di Kecamatan Badegan, 13/09/2009.

¹² Wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat di Desa Badegan, Ponorogo, 15/09/2009.

C. Perbandingan Fenomena Konflik Silat di Madiun dan Sekitarnya

Ada sedikit perbedaan yang ada di 2 kecamatan yang juga menjadi daerah penelitian terhadap fenomena keberadaan kelompok silat. Di Kecamatan Sampung, kelompok silat yang ada relatif heterogen jenisnya, namun masih tetap didominasi oleh dua aliran Setia Hati baik Teratai maupun Winongo dengan jumlah warga masing-masing kelompok tersebut yang relatif seimbang sehingga menjadikan wilayah di kecamatan tersebut terpolarisasi menjadi 2 kutub yang berbeda. Di pusat kota Kecamatan Sampung lebih didominasi oleh SHW sedangkan di daerah pinggiran Kecamatan Sampung merupakan basis dari SHT. Potensi konflik yang terjadi pun cukup besar.

Sementara Kecamatan Badegan merupakan basis SHT dan mayoritas anggota masyarakatnya bergabung dalam organisasi tersebut. Hal tersebut tidak berarti organisasi silat yang lain tidak berkembang di kecamatan ini, beberapa organisasi silat juga ditemukan di Kecamatan Badegan namun dalam jumlah anggota yang relatif kecil. Meski demikian bukan berarti bahwa Kecamatan Badegan memiliki potensi konflik antarorganisasi silat menjadi kecil. Kenyataan yang terjadi warga SHT Badegan justru banyak yang menjadi pelaku perkelahian antarkelompok silat yang terjadi di wilayah luar Kecamatan Badegan.

Konflik memang hampir tidak pernah menyeret elite di tingkat paling atas, bahkan pendekar-pendekar di tingkat menengah. Konflik senantiasa bergerak dari serentetan pertemuan antarmassa yang berada di tingkat paling bawah. Namun sesungguhnya ketika konflik berlangsung secara sporadis, elite secara diam-diam memberi *support*, meskipun pada level *surface structure* mereka selalu memberikan retorika yang seolah-olah dilakukan oleh 'oknum'. Di Indonesia, formalitas dalam mengatasi berbagai konflik antarkelompok, antaretnis, antaragama, dan antaraliran biasa terjadi. Konflik Ambon, Poso, Kalbar, dan serangkaian konflik-konflik lain selalu diselesaikan semata-mata dengan 'semangat pernyataan'. Akar konflik tidak pernah terselesaikan. Ketika konflik berulang pascapernyataan, elite selalu melempar retorika dengan perangkat kata 'oknum'. Akibatnya oknum telah ditafsirkan bahwa sebenarnya konflik struktural tidak terjadi, karena yang terjadi adalah perilaku oknum. Sementara itu kenyataan yang ada bahwa secara struktur konflik akan terus berlangsung, dengan atau tanpa kata 'oknum'.

Panatisme antarkelompok pun semakin lama terlihat menjadi tajam didorong oleh pengaruh kepentingan organisasi berupa:

1. Persaingan yang ketat antara kedua perguruan untuk mendapatkan murid atau warga.
2. Merupakan perguruan silat yang dominan dengan jumlah yang hampir sama dan relatif banyak dibandingkan dengan perguruan lain yang tersebar di Madiun dan sekitarnya.

3. Lokasi kedua pusat perguruan saling berdekatan yaitu berada dalam satu kecamatan di Kotamadya Madiun.
4. Pengurus masing-masing perguruan kurang berwibawa dan manajemen organisasi yang kurang baik. Hal ini terbukti apabila terjadi tindak kekerasan tidak mampu meredam dan mengendalikan warga masing-masing.
5. Sebagian masyarakat Madiun (juga pada saat mengikuti kegiatan perguruan) gemar mengkonsumsi Miras (minuman keras) yang cukup terkenal/khas di Madiun dan sekitarnya yaitu Arak Jowo (*Arjo*), yang biasa menjadi pemicu terjadinya konflik di kalangan akar rumput.¹³

Kasus perkelahian antaranggota kelompok silat seperti yang terjadi di wilayah Ponorogo oleh elite organisasi silat dianggap sebagai suatu kenakalan remaja yang wajar, karena pelakunya kebanyakan adalah anggota organisasi yang masih berusia muda. Oleh karena itu pihak elite kelompok silat tersebut secara terus terang lebih banyak menyerahkan penanganannya kepada pihak aparat keamanan yang mempunyai kewenangan dalam mengatasi persoalan tersebut. Walaupun pada akhirnya proses penyelesaiannya selalu berakhir dengan ketidakjelasan. Artinya, selama ini penyelesaian kasus selalu bias dan selalu tidak memuaskan. Meski telah terjadi kesepakatan, konflik terus terjadi dan ini telah menjadi rahasia umum. Sebagaimana penuturan informan, "*...Ning ditutup mboten dibuka, rahasia....*" (Tetapi kasusnya ditutup tidak dibuka, rahasia....).¹⁴ Sedangkan di kalangan antara elite masing-masing kelompok silat tidak pernah terjadi permasalahan. Pusat padepokan perguruan silat yang terdapat di Madiun pun satu sama lain saling berdekatan dalam satu wilayah.

D. Kontestasi Kesalihan Agama dan Sosial yang Paradoksal

Antara SHT dan SHW' sesungguhnya tidak ada perbedaan prinsip dalam tujuannya karena keduanya merupakan dua perguruan pencak silat yang berasal dari induk yang sama, juga dalam hal ilmu yang dipelajari. Namun persepsi tentang konflik, sebenarnya merupakan sebuah pemahaman yang universal. Itu sebabnya meskipun dalam konflik SHT - SHW banyak mempersepsikan kelompok lain lebih kejam dibanding kelompoknya akan tetapi karena menyangkut kelompok, konflik atau perkelahian dengan kekerasan menjadi sebuah peristiwa yang diberikan toleransi. Selain dalam hubungan antakelompok persepsi semacam itu juga dibangun karena adanya stereotipe-stereotipe

¹³ Ini dapat dilihat dari petunjuk yang diperoleh dari beberapa tersangka yang terlibat tawuran yang diamankan di Polres Madiun. Petunjuk lain juga dapat diperoleh dari tingginya angka pengungkapan kasus penjualan minuman keras tanpa ijin khususnya *Arjo* oleh Polres Madiun dan Polres-Polres jajaran Polwil Madiun lainnya.

¹⁴ Wawancara dengan Kamituwo Desa Badegan, Kecamatan Badegan, 16/09/2009.

yang secara sengaja atau tidak diciptakan oleh sebuah kelompok yang satu kepada kelompok yang lain (Horowitz, 1975).

Slogan yang tidak asing dan sangat melekat di antara anggota kedua perguruan, *Manusia dapat dibancurkan, manusia dapat dimatikan akan tetapi manusia tidak dapat dikalahkan selama manusia itu setia pada hatinya atau ber-SH pada dirinya sendiri*" memiliki makna yang tidak sederhana. Dalam dimensi ke-SH-an, hati menjadi pusat pengendalian diri. Hati menjadi sumber kekuatan yang tersembunyi yang mampu direkayasa ke dalam setiap perilaku dan cara berpikir manusia. Konsep ini sesungguhnya, menurut salah seorang pendekar, bersumber dari Islam, yang disebut dengan *qolbu*. Sebagaimana sabda rasulullah: "Dinamakan hati (*al-qolbu*) karena cepatnya berubah." (HR. Ahmad). Rasulullah juga bersabda: "Perumpamaan hati adalah seperti sebuah bulu di tanah lapang yang diubah oleh hembusan angin dalam keadaan terbalik." (HR. Ibnu Abi Ashim).¹⁵

Secara normatif dan sloganistik, hampir tidak ditemukan perguruan silat terutama SHT dan SHW yang tidak menginfuskan nilai kesalihan agama dan sosial di perguruanannya. Dalam setiap ritual tahunan, misalnya Suran Agung atau Halal Bil Halal, dan religiusitas anggota selalu dikedepankan, akan tetapi memang tidak mudah mengukur hubungan antara 'semangat keagamaan' dengan 'semangat kekerasan berdasar ideologi perguruan'. Terlebih jika hal itu kemudian dikaitkan dengan semangat bela negara. Agama, bela negara, dan bela diri secara ideal memang memiliki keterkaitan dan memiliki prospek sebagai perekat bangsa. Namun dalam tataran praksis, beberapa persoalan masih sering muncul.

Hampir setiap saat dalam tradisi persilatan dilakukan semacam 'wejangan' bagi anggota baru dalam membangun jiwa disiplin dan bela negara. Bela negara biasanya selalu dikaitkan dengan militer atau militerisme, seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada Tentara Nasional Indonesia (TNI). Padahal berdasarkan pasal 30 UUD 1945, bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Republik Indonesia. Bela negara adalah upaya setiap warga negara untuk mempertahankan Republik Indonesia terhadap ancaman baik dari luar maupun dalam negeri. UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara RI mengatur tata cara penyelenggaraan pertahanan negara yang dilakukan oleh TNI maupun oleh seluruh komponen bangsa. Upaya melibatkan seluruh komponen bangsa dalam penyelenggaraan pertahanan negara itu antara lain dilakukan melalui Pendidikan Pendahuluan Bela Negara. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana agama dikontekskan oleh SHT dan SHW sebagai bagian dari bela negara?

Jika melihat fenomena konflik SHT dan SHW yang kemudian dikaitkan dengan agama, jelas sedang terjadi gejala yang paradoks. Para pendekar dua perguruan yang biasanya memiliki basis agama

¹⁵ Berdasar wawancara dengan salah seorang pendekar SH, 10/09/2009.

kuat tentu *baqq al-yuqin* bahwa manusia di muka bumi ini tidak bisa hidup selamat tanpa agama. Sebagaimana dikatakan John Naisbitt (1990), agama dapat memberi manusia arti hidup: sesuatu yang tak pernah diberikan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan risalah Islam, nabi akhir zaman, Muhammad SAW, telah berhasil menebarkan *rahmatan lil-'alamin*, tetapi serangkaian konflik masih tetap berlangsung secara berkala. Padahal para agamawan tak henti-hentinya menyuarakan risalah agama. Agama sebagai kanopi suci kehidupan, agama sebagai pembawa kedamaian, agama sebagai peredam konflik, menjadi slogan yang tak henti-hentinya dikumandangkan.

Tentu, tidak adil mempertautkan setiap kebobrokan dengan agama. Ada banyak lorong kehidupan di dunia ini yang tak sepenuhnya berkait langsung dengan agama. Ada hukum-hukum duniawi yang memiliki watak khas dalam dirinya. Boleh jadi ia merupakan khas urusan politik, urusan ekonomi, urusan hukum. Suatu urusan yang oleh nabi dikatakan, "Engkau lebih tahu urusan duniamu." Lebih-lebih jika agama sekadar disudutkan untuk menjadi pembersih 'piring kotor'. Juga untuk sistem kehidupan yang tak bersahabat dengan agama, bahkan melempar pengaruh agama dari umat manusia. Sebab itu beban agama tentu saja menjadi berlebihan. Ketika membangun pondasi agama tidak dilibatkan, tetapi ketika bangunan bobrok lantas mencari pertautan bahkan kambing hitam pada agama.

Namun, juga tidak terlampau keliru jika agama masih menempati urutan pertama ketika manusia menuntut pencerahan hidup. Juga tak berlebihan jika setiap terjadi kebobrokan yang nista, kemudian dicarikan persambungannya dengan fungsi profetik agama. Agama menyangkut masalah paling fundamental dalam hidup umat manusia. Agama selalu berkepentingan dengan proses sublimasi kehidupan, untuk menjadikan kehidupan ini jernih dan bersih. Hampir semua elite SHT dan SHW meyakini bahwa sesungguhnya agama mampu menjadi perekat dalam kehidupan antarmereka, terlebih bahwa sebenarnya mereka berasal dari satu induk. Namun kenyataan, fanatisme yang berlebihan telah membuat mereka menjadi sulit terkendali. Pervira Polisi Polres Madiun menyebutnya dengan fanatisme sempit.¹⁶ Fanatisme sempit inilah yang kemudian menjadikan SHW dan SHT sulit mengembangkan nilai agama untuk mencegah konflik.

Melihat terus terjadinya konflik antaranggota perguruan, masyarakat telah terjebak ke dalam permainan sosial. Permainan sosial atau *social play*, merupakan istilah Marc Bekoff (2001) yang mengidentifikasi bahwa bertahannya keberadaan (*existence*) manusia didasarkan pada munculnya kompetisi sosial yang mengandung durasi kompetisi serta fluktuasi kompetisi antarindividu. Permainan sosial lebih dilihat sebagai pergulatan internal dalam satu komunitas yang mana didalamnya penuh unsur-unsur *chaos* dan ambigu. Seperti saling mendukung, berteman namun

¹⁶ Wawancara dengan seorang pervira polisi setempat, 10/09/2009.

sebaliknya juga saling mengalahkan. Bekoff menyebut terdapat tiga karakter sekaligus dalam sebuah permainan sosial yakni, *to fight, to mate, or engage in "predatory activities"*, ("saling memakan", "saling menjatuhkan", "saling mengalahkan" bahkan "saling membunuh").

Tiga unsur yang ambigu ini tergantung pada suasana sosial (*social mood*) interaksi suatu komunitas atau kelompok. Munculnya keinginan *to fight* disebabkan kesalahan-kesalahan tafsir (*misinterpreted*) dalam satu komunitas. Kesalahan tafsir didefinisikan sebagai pembelokkan makna antarindividu dalam menyampaikan serta menerima kode-kode interaksi yang tengah dimainkan. Pembelokkan makna ini terjadi karena individu mengalami kegagalan dalam memainkan peranannya pada berbagai konteks interaksi yang berbeda.

Sedangkan munculnya *to mate* disebabkan keinginan untuk menghadirkan bentuk-bentuk persetujuan di antara satu kelompok. Konsep resiprositas atau interaksi yang saling memberi dan menerima terjadi secara seimbang, dalam hal ini Bekoff menyebutnya sebagai '*behaving fairly*'. Istilah *to mate* cenderung mereduksi munculnya potensi kompetisi sosial, dengan asumsi bahwa manusia mempunyai ekspektasi sosial ketika terjadi sebuah pertemuan maka manusia akan berusaha untuk menghilangkan nuansa ketidakadilan sebagai bentuk etika sosial. Dalam permainan sosial, pelanggaran dan kesalahan akan dimaafkan dan apology akan diterima, khususnya jika pemain dalam kompetisi sosial ini bersifat lebih muda, yunior atau mempunyai status yang lebih rendah. Namun, bentuk pemaafan terhadap pelanggaran permainan sosial lebih merupakan strategi kerjasama agar individu yang lebih muda, mau berkooperasi dan bernegosiasi dalam sebuah permainan sosial. Dengan demikian sebuah permainan sosial sebenarnya mengharuskan individu untuk tetap menjaga "the rules of the game" yang sebenarnya penuh dengan kompetisi sosial yang saling mengalahkan dan menjatuhkan (Bekoff, 2001).

Jika Bekoff lebih melihat kompetisi sosial pada sisi ambiguitas yang muncul secara tak terduga (kadang berteman, namun secara tiba-tiba bisa saling mengalahkan). Sebaliknya, Pierre Bourdieu melihat bahwa kompetisi sosial lahir dari adanya sejumlah perbedaan-perbedaan yang terbangun dan ditampilkan dalam sebuah sistem sosial. Kebudayaan yang dibawa individu, diproduksi dan ditunjukkan kepada khalayak untuk dikontestasikan. Di ranah relasi sosial, muatan perbincangan merupakan ranah yang paling mudah untuk melihat representasi latar belakang individu sekaligus menjadi tanda pengungkapan adanya distingsi atau perbedaan.

Tujuan dari dimunculkannya distingsi dalam kompetisi sosial adalah mengekspresikan kepentingan-kepentingan tertentu dari pelaku, yang kemudian dikembangkan menjadi klaim-klaim eksklusif sehingga mampu mengontrol terhadap klien/lawan relasi sosial. Secara historis, munculnya kekuasaan dalam kompetisi sosial tidak lepas dari aksi-aksi yang dijalankan melalui perjuangan

material dan simbolik yang diproduksi ke ranah kebudayaan. Hingga ia mengalami objektivasi (baca: persetujuan) dalam lingkungan sosial dan internalisasi pada diri individu, bahwa ia sadar tengah berkuasa. Kompetisi sosial menghasilkan adanya distingsi/perbedaan yang bersifat hirarkis dan dijadikan legitimasi oleh suatu individu maupun kelas sosial (Bourdieu, 1986).

Bourdieu tidak melihat bahwa relasi sosial penuh dengan nilai kenetralan, dalam hal kompetisi sosial, ia mengembangkan konsep *field of struggle*. Konsep ini dimaknai sebagai suatu strategi dan upaya individu untuk menyejajarkan dirinya dalam posisi sosial yang lebih tinggi. Secara politis, kompetisi sosial atau dalam bahasa Bourdieu adalah *field of struggle* ini menjadi perebutan kepemilikan terhadap bentuk barang, distribusi dan kekuasaan yang sifatnya terbatas. Melalui berbagai strategi yang sifatnya antagonistik, individu berusaha mentransformasikan dirinya dalam kelas-kelas yang lebih tinggi dan mapan (Bourdieu: 1986).

Transformasi individu dalam kompetisi sosial, mengkondisikannya untuk menyesuaikan diri dengan berbagai posisi dan kelas sosial yang ingin diraihinya. Bourdieu mengkonsepsikannya dengan istilah *disposition*. Secara simbolik, disposisi menghasilkan perjuangan masing-masing individu untuk menjadi lebih baik atau menanjak ke atas. Keinginan mereka-mereka yang kalah dan mempunyai modal kapital serta modal simbolik lebih sempit untuk naik ke jenjang atas, tak lepas dari disposisi serangan penguasaan simbolik (*symbolic mastery*) yang menjadi hak preogratif penguasa dalam suatu kompetisi sosial. Disposisi tidak hanya pencerminan sebuah kondisi kelas, namun juga mengacu pada ranking struktur kelas yang saling berhubungan dan penjagaan terhadap karakter kelas (moralitas dan estetika, khususnya pada kelas atas).

Dengan demikian, pada masing-masing individu kelas hegemonik/kelas atas akan menjaga *image* mereka dengan memberikan batasan menciptakan distingsi dan menjaga jarak dengan kelas lainnya. Meskipun karakter disposisi ini kadangkala tak disengaja, namun tetap bertujuan memberikan sebuah kejelasan dan kesadaran bahwa posisi atau kelas yang berbeda akan mempunyai nilai-nilai; pola pandang dan kepercayaan yang berbeda pula. Karena dari disposisi inilah kemudian tercipta karakter-karakter yang berposisi biner (atas-bawah; baik-buruk; menang-kalah dst). Tanpa diasadari, sebenarnya individu yang berkuasa tengah memprovokasi nilai-nilai simboliknya terhadap individu atau kelas yang berada di bawahnya, sehingga memunculkan apa yang dinamakan sebagai proses duplikasi, di mana individu/kelas yang kalah/di bawahnya akan mencontoh pola-pola atas yang dianggap lebih tinggi. Proses duplikasi dan apropriasi yang digambarkan oleh Bourdieu hampir tidak mengganbarkan nilai-nilai resistensi pada kelas bawah atau individu yang kalah (Bourdieu, 1986; 1991). Untuk mencapai suatu disposisi tertinggi dalam kompetisi sosial dan menentukan tinggi

rendahnya suatu kelas dan individu, Bourdieu menetapkan empat syarat atau empat modal yang harus dimiliki, yakni, modal ekonomi, modal sosial, modal budaya, dan modal simbolik.

IV. Simpulan

Selain isu identitas berkait originalitas, perbedaan penafsiran, dan klaim kebenaran tentang ideologi ke-SH-an yang terus menerus direproduksi, faktor-faktor lain yang turut memperparah sehingga konflik antara SHT dan SHW tidak kunjung usai adalah karena adanya perebutan wilayah dan anggota. Bahwa ketika dua murid SH mendirikan perguruan, masing-masing Teratai dan Winongo, mereka membuat kesepakatan untuk melakukan pembagian wilayah 'kekuasaan'. Winongo akan membangun basis di wilayah perkotaan, sedangkan Teratai di wilayah pinggiran. Namun pada perkembangannya, di beberapa wilayah baik perkotaan maupun pinggiran yang menjadi wilayah 'tiris' antara Teratai dan Winongo adalah merupakan ajang perebutan wilayah antara SHT dan SHW. Wilayah ini sangat rentan terjadi konflik karena masing-masing organisasi baik Teratai maupun Winongo bersaing untuk mendapatkan anggota sebanyak-banyaknya. Penggalangan anggota ini tentu saja berorientasi pada prestise organisasi, semakin banyak anggotanya maka ia akan semakin terstigmatisasi sebagai organisasi yang besar. Lebih dari itu, hadirnya nuansa politisasi dalam sebuah organisasi silat ikut ambilperan dalam menambah rantai konflik yang semakin panjang dan sulit untuk diselesaikan.

Di bagian lain, dapat dikatakan bahwa konflik antarorganisasi silat di Madiun dan sekitarnya merupakan konflik lama dengan versi konflik terbaru dan isu kelompok silat sebagai manifestnya. Tipologi konflik semacam ini akan selalu hadir pada masyarakat yang berkarakter agraris, sebagaimana wilayah Madiun dan sekitarnya. Pada masyarakat yang memiliki karakter sosiokultural agraris ditambah lagi budaya kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat tersebut, membuat mereka termajinalisasi baik secara mental maupun fisik. Tak heran jika masyarakat memiliki sejumlah pengharapan dan membutuhkan suatu media sosial yang mampu membantu melepaskan segala rutinitas yang biasa dihadapi oleh anggota masyarakat tersebut. Itu sebabnya, ketika fenomena organisasi silat masuk dalam lingkungan kehidupan masyarakat, dianggap sebagai suatu kesibukan baru di luar rutinitas mereka sehari-hari yang mampu mengakomodasikan harapan-harapan mereka. Ditambah lagi ideologi yang dikembangkan oleh berbagai organisasi silat yang ada menjadikan silat merupakan sesuatu yang sangat familiar di kalangan masyarakatnya. Tak pelak anggota masyarakatnya memiliki partisipasi yang demikian besar dengan menjadi bagian dari organisasi silat tersebut. Partisipasi dan fokus perhatian anggota masyarakat terhadap fenomena organisasi silat akan hilang dengan sendirinya jika muncul alternatif lain yang mampu menyita perhatian masyarakat tersebut.

Selain hal-hal di atas, hampir semua elite SHT dan SHW meyakini bahwa sesungguhnya agama mampu menjadi perekat dalam kehidupan antarmereka, terlebih bahwa sebenarnya mereka berasal dari satu induk. Namun kenyataan, fanatisme yang berlebihan telah membuat mereka menjadi sulit terkendali atau terjadi fanatisme sempit. Fanatisme sempit inilah yang kemudian menjadikan SHW dan SHT sulit mengembangkan nilai agama untuk mencegah konflik.

Peluang inilah hendaknya dapat ditangkap oleh para agen pembangunan untuk menciptakan suatu media sosial terbaru di masyarakat yang mampu menyita kesibukan masyarakat di luar rutinitas mereka sehari-hari. []

Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan, 2001. "Globalisasi, Redefinisi Budaya, dan Munculnya Masyarakat Terbuka", *Terang*, Vol. I, No. 1, hal. 37-47.
- Abdullah, Irwan dan Riza Arfani Noer, 2002. "Budaya dan Struktur Manajemen Konflik di Indonesia: Kasus Konflik Etnis dan Agama", *Bina Darma*, Vol. 20, No. 62, hal. 13-26.
- Ahimsa-Putra, Heddy Shri, 1999. Pola Komunikasi Budaya Antara Etnis, makalah yang disampaikan dalam *Pembinaan Teknis Sosial Budaya*, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Depdikbud, Bogor, 16 Juni.
- Appadurai, Arjun, 1995. "The Production of Locality", dalam R. Fardon (ed.), *Counterworks: Managing the Diversity of Knowledge*, London: Routledge.
- Alqadrie, Syarif Ibrahim, 1999. "Konflik Etnis di Ambon dan Sambas: Tinjauan Sosiologis", makalah seminar *Jubileum ke-30 Jurnal Antropologi Indonesia*, Kampus UI Depok, 6-8 Mei 1999.
- _____, 2001. "Konflik Komunal: Masalah Masyarakat Madura di Kalimantan Barat", Andi Syamsu Rijal (ed), *Kumpulan Makalah Diskusi Sejarah Lokal, Sub-Tema: Konflik Komunal dan Ketersingkirian Sosial*, Proyek Peningkatan Kesadaran Sejarah Nasional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan Nasional RI, hal. 91-133.
- Bekoff, Marc, 2001. Social Play Behaviour: Cooperation, Fairness, Trust, and the Evolution of Morality, *Journal of Consciousness Studies*, 8 (2).
- Berger, Peter dan Thomas Luckmann, 1979. *The Social Construction of Reality*. New York: Penguin Books.
- Bourdieu, Pierre, 1990. *An Introduction to the Work of Pierre Bourdieu: The Practice Theory*, London: The Macmilland Press Ltd.
- _____, 1986. *Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste*, translated by Richard Nice, London: Routledge.
- _____, 1991. *Language and Symbolic Power*, Massachussets: Harvard University Press.
- Bungin, Burhan (ed), 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Raja Grasindo Persada.
- Cheater, Angela, 1999. *The Anthropology of Power*, London: Routledge.
- Eller, J, 1999. *From Culture to Ethnicity to Conflict*, The University of Michigan Press, Ann Arbor.